

BUPATI LAMANDAU
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 08 TAHUN 2009
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pengembangan Agribisnis Pertanian perlu didukung dengan penyediaan sarana produksi khususnya pupuk sampai ke tingkat petani;
- b. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, untuk mencapai sasaran tersebut dipandang perlu mengatur kebutuhan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Lamandau Tahun 2009;
- c. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lamandau tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 08/Permentan/SR.140.2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40/Permentan/SR.140.2/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/09/2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009;

15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1124/BSP-410/11/2008 Tanggal 15 Nopember 2008 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009;
22. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 423 Tahun 2003 tentang Komisi Pengawasan Pestisida dan Pupuk Provinsi Kalimantan Tengah;
23. Keputusan Bupati Lamandau Nomor 520/046/VII/2004 tentang Komisi Pengawasan Pestisida dan Pupuk Kabupaten Lamandau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMANDAU TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2009.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Lamandau;
2. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi kepentingan tanaman secara langsung atau tidak langsung;

3. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk;
4. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah;
5. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan harga sesuai Harga Eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur/pengecer resmi di Lini IV;
6. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan;
7. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Rakyat, Hijauan Makanan ternak dan Budidaya Ikan dan Udang;
8. Petani adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan dan atau tanaman hortikultura;
9. Pekebun adalah perorangan warga negara indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, melakukan usaha tanaman perkebunan rakyat;
10. Peternak adalah perorangan warga negara indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan makanan ternak yang tidak memiliki izin usaha;
11. Pembudidaya ikan atau Udang adalah perorangan warga negara indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang yang tidak memiliki izin usaha;
12. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk an-organik (Urea, NPK, ZA, Superphos) dan pupuk organik di dalam Negeri;
13. Penyalur di Lini III adalah Distributor Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian RI Nomor 21/M.DAG/PER/2/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
14. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer resmi ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian RI Nomor 21/M.DAG/PER/2/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
15. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Kepala Desa/ Lurah, Camat, Bupati/Walikota dan Gubernur;
16. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota;

17. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompoktani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompoktani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi;

BAB II
PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar dan setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar;
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya;

BAB III
ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 3

- (1) Alokasi Pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi serta plafon alokasi pupuk bersubsidi Kabupaten Lamandau tahun 2009;
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana pada ayat (1) dirinci menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan seperti tercantum pada Lampiran Peraturan ini;
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan dengan Peraturan Bupati;
- (4) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Koordinator BPP setempat;
- (5) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, dan pembudidaya ikan dan atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompoktani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usahatani dan atau kemampuan penyerapan pupuk ditingkat petani diwilayahnya;

Pasal 4

- (1) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lamandau ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lamandau;
- (2) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lamandau sambil menunggu penetapan oleh Bupati Lamandau guna memenuhi kebutuhan petani di lapangan;

- (3) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di satu Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka distributor dan penyalur/pengecer resmi dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang ada tersedia dan atau bulan-bulan berikutnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV
PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 5

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri dari pupuk anorganik (Urea, ZA, Superphos dan NPK) dan pupuk organik; yang diproduksi dan atau diadakan oleh produsen;
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. Petrokimia Gresik.
- (3) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dicirikan dengan label tambahan berwarna merah yang bertuliskan

“Pupuk Bersubsidi Pemerintah”

Barang Dalam Pengawasan

Mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur resmi Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan menteri Perdagangan dan Perindustrian RI nomor 21/M-DAG/PER/2/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Lamandau;
 - c. Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lamandau melakukan pembinaan dan koordinasi secara intensif dengan pihak penyalur resmi serta pihak terkait lainnya.
- (3) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai suatu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten Lamandau.

Pasal 7

- (1) Penyaluran di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET);
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = Rp. 1.200,- per Kg
 - b. Pupuk ZA = Rp. 1.050,- per Kg
 - c. Pupuk Superphos = Rp. 1.550,- per Kg
 - d. Pupuk NPK Phonska (15:15:15) = Rp. 1.750,- per Kg
 - e. Pupuk NPK Pelangi (20:10:10) = Rp. 1.830,- per Kg
 - f. Pupuk NPK Kujang (30:6:6) = Rp. 1.586,- per Kg
 - g. Pupuk Organik = Rp. 500,- per Kg
- (3) Harga Eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang di penyalur resmi Lini IV secara tunai.

Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan;
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan kabupaten Lamandau, bagi kecamatan yang penyerapan pupuknya telah melebihi alokasinya, maka dapat dilakukan realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

Produsen berkewajiban melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan, dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Pasal 10

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten Lamandau melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.

- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Lamandau dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Koordinator BPP, Penyuluh Pertanian, Tenaga Harian Lepas (THL) dan Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Petugas Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP).

Pasal 11

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Lamandau wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati Lamandau;
- (2) Bupati Lamandau menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Dinas teknis terkait.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada tanggal : 10 Pebruari 2009

BUPATI LAMANDAU,

ttd

MARUKAN

Diundangkan di : Nanga Bulik
Pada tanggal : 10 Pebruari 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

ttd

MASRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2009 NOMOR : 87

Nomor : 08 Tahun 2009

MENURUT SUB SEKTOR

Sub Sektor	Jenis Pupuk			
	Urea	Superphos	NPK	ORGANIK
- Tanaman Pangan	68	29	21	50
- Hortikultura	7.5	4.50	18	7
- Perkebunan Rakyat	74	12	25	-
- Peternakan	1.6	-	-	-
- Perikanan Budidaya	2.5	1.2	-	-
JUMLAH	153.6	46.7	64	57

ttd

MARUKAN

Nomor : 08 Tahun 2009

REKAPITULASI RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2009

No	Jenis Pupuk /Sektor / Sub Sektor	Kebutuhan Pupuk Setiap Bulan										
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop
I.	UREA											
	a. Tanaman Pangan dan Hortikultura											
	- Tanaman Pangan	3	2	4	10	10	2	1	1	8	15	10
	- Hortikultura	0	0	0	4.5	2.25	0	0	0	0	0	0
	b. Perkebunan	7	7	11	7	4	7	5	4	4	7	7
	c. Peternakan	0.45	0.3	0	0	0	0	0	0	0.75	0.1	

	d. Perikanan Budidaya	0	0	0	0	0	1.25	1.25	0	0	0	0
	Jumlah	10.45	9.3	15	21.5	16.25	10.25	7.25	5	12.75	22.4	17.5
II.	SUPERPHOS											
	a. Tanaman Pangan dan Hortikultura											
	- Tanaman Pangan	1.2	0.8	1.55	3.9	4.05	0.67	0.39	0.39	3.1	7.25	4.9
	- Hortikultura	0	0	0	2.7	1.35	0	0	0	0	0.18	0.18
	b. Perkebunan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	c. Peternakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d. Perikanan Budidaya	0	0	0	0	0	0.6	0.6	0	0	0	0
	Jumlah	2.2	1.8	2.55	7.6	6.4	2.27	1.99	1.39	4.1	8.43	6.08
III.	NPK											
	a. Tanaman Pangan dan Hortikultura											
	- Tanaman Pangan	1.1	0.5	1.5	2.05	2.45	0.4	0.2	0.2	2.35	5.75	3.9
	- Hortikultura	0	0	0	11	5	0	0	0	0	1	1
	b. Perkebunan	2	3	1	1	2	3	1	3	3	1	3
	c. Peternakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d. Perikanan Budidaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	3.1	3.5	2.5	13.85	9.85	3.4	1.2	3.2	5.35	7.47	7.68
IV.	ORGANIK											
	a. Tanaman Pangan dan Hortikultura											
	- Tanaman Pangan	2.1	1.35	2.45	5.75	7	1.45	0.6	0.4	7	13	8.05
	- Hortikultura	0	0	0	2	1.5	0	0	0	1	1.5	1
	b. Perkebunan Rakyat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c. Peternakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d. Perikanan Budidaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	2.1	1.35	2.45	7.75	8.5	1.45	0.6	0.4	8	14.5	9.05
V.	ZA											
	a. Tanaman Pangan dan Hortikultura											
	- Tanaman Pangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.5
	- Hortikultura	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0.5	0
	b. Perkebunan	0.5	0.5	0.25	0.25	0	0.5	0	0.25	0	0.5	0
	c. Peternakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d. Perikanan Budidaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	0.5	0.5	0.25	0.75	-	0.50	-	0.25	-	2	0.5

BUPATI LAMANDAU,

ttd

MARUKAN

Lampiran III : Peraturan Bupati Lamandau**Nomor : 08 Tahun 2009****RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2009**

Kabupaten : LAMANDAU
Sub Sektor : TANAMAN PANGAN
Jenis Pupuk : UREA

Kecamatan	Bulan									
	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt
1. Bulik	0.25	0.15	0.75	1.5	1.5	0.45	0.1	0.1	1.5	2.2
2. Bulik Timur	0.5	0.25	0.5	1	1	0.3	0.1	0.1	1.25	1
3. Menthobi Raya	0.75	0.5	1	2.25	2.5	0.5	0.25	0.25	1.75	4
4. Sematu Jaya	1	1	1.25	3	3	0.75	0.5	0.5	1.75	4.
5. Belantikan Raya	0.25	0.1	0.25	0.75	0.75	0	0	0	0.5	1.2
6. Lamandau	0.15	0	0.25	0.75	0.75	0	0	0	0.5	0.7
7. Batang Kawa	0	0	0	0.25	0.25	0	0	0	0.25	0.7
8. Delang	0.1	0	0	0.5	0.25	0	0.05	0.05	0.5	0.
Kabupaten Lamandau	3	2	4	10	10	2	1	1	8	1

BUPATI LAMANDAU,**ttd****MARUKAN****Lampiran IV : Peraturan Bupati Lamandau****Nomor : 08 Tahun 2008****RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 20**

Kabupaten : LAMANDAU
Sub Sektor : HORTIKULTURA
Jenis Pupuk : UREA

Kecamatan	Bulan										
	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop

1.	Bulik	0	0	0	0.75	0.5	0	0	0	0	0.1	0.1
2.	Bulik Timur	0	0	0	0.75	0.25	0	0	0	0	0	0
3.	Menthobi Raya	0	0	0	0.75	0.5	0	0	0	0	0.1	0.1
4.	Sematu Jaya	0	0	0	0.75	0.5	0	0	0	0	0.1	0.1
5.	Belantikan Raya	0	0	0	0.25	0.25	0	0	0	0	0	0
6.	Lamandau	0	0	0	0.75	0.25	0	0	0	0	0	0
7.	Batang Kawa	0	0	0	0.25	0	0	0	0	0	0	0
8.	Delang	0	0	0	0.25	0	0	0	0	0	0	0
Kabupaten Lamandau		0	0	0	4.5	2.25	0	0	0	0	0.3	0.3

BUPATI LAMANDAU,

ttd

MARUKAN

Lampiran V : Peraturan Bupati Lamandau

Nomor : 08 Tahun 2008

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 20

Kabupaten : LAMANDAU
Sub Sektor : PERKEBUNAN
Jenis Pupuk : UREA

Kecamatan	Bulan										
	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov
1. Bulik	1.5	1.5	3	1.5	0.5	1.5	1	0.5	1	1	
2. Bulik Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Menthoi Raya	2.5	3	4	2.5	2	2.5	2	2	1	3	
4. Sematu Jaya	3	2.5	4	3	1.5	3	2	1.5	2	3	
5. Belantikan Raya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Lamandau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Batang Kawa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Delang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kabupaten Lamandau	7	7	11	7	4	7	5	4	4	7	

BUPATI LAMANDAU,

ttd

MARUKAN

Lampiran VI : Peraturan Bupati Lamandau

Nomor : 08 Tahun 2009

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2009

Kabupaten : LAMANDAU

Sub Sektor : PETERNAKAN

Jenis Pupuk : UREA

Kecamatan	Bulan									
	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt
1. Bulik	0.15	0.1	0	0	0	0	0	0	0.15	0.1
2. Bulik Timur	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0
3. Menthobi Raya	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0
4. Sematu Jaya	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0.15	0
5. Belantikan Raya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Lamandau	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0.15	0
7. Batang Kawa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Delang	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0
Kabupaten Lamandau	0.5	0.3	0	0	0	0	0	0	0.8	0.1

BUPATI LAMANDAU,

ttd

MARUKAN

Lampiran VII : Peraturan Bupati Lamandau

Nomor : 08 Tahun 2009

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2009

Kabupaten : LAMANDAU

Sub Sektor : PERIKANAN BUDIDAYA

Jenis Pupuk : UREA

Kecamatan	Bulan										
	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	N
1. Bulik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Bulik Timur	0	0	0	0	0	0.25	0.25	0	0	0	
3. Menthobi Raya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Sematu Jaya	0	0	0	0	0	0.25	0.25	0	0	0	
5. Belantikan Raya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Lamandau	0	0	0	0	0	0.25	0.25	0	0	0	
7. Batang Kawa	0	0	0	0	0	0.25	0.25	0	0	0	
8. Delang	0	0	0	0	0	0.25	0.25	0	0	0	
Kabupaten Lamandau	0	0	0	0	0	1.25	1.25	0	0	0	

BUPATI LAMANDAU,

ttd

MARUKAN

Lampiran VIII : Peraturan Bupati Lamandau

Nomor : 08 Tahun 2009

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2009

Kabupaten : LAMANDAU
Sub Sektor : TANAMAN PANGAN
Jenis Pupuk : SUPERPHOS

Kecamatan	Bulan										
	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop
1. Bulik	0.2	0.05	0.25	0.5	0.5	0.1	0.05	0.05	0.5	1.25	0.5
2. Bulik Timur	0.1	0.1	0.1	0.4	0.4	0.12	0.04	0.04	0.5	0.4	0.15
3. Menthobi Raya	0.3	0.2	0.5	1	1.25	0.2	0.1	0.1	0.7	1.75	1.25
4. Sematu Jaya	0.4	0.4	0.5	1.2	1.2	0.25	0.2	0.2	0.7	2.25	1.5
5. Belantikan Raya	0.1	0.05	0.1	0.25	0.25	0	0	0	0.2	0.6	0.4
6. Lamandau	0.05	0	0.1	0.25	0.25	0	0	0	0.2	0.5	0.5
7. Batang Kawa	0	0	0	0.1	0.1	0	0	0	0.1	0.3	0.25
8. Delang	0.05	0	0	0.2	0.1	0	0	0	0.2	0.2	0.35

Kabupaten Lamandau	1.2	0.8	1.55	3.9	4.05	0.67	0.39	0.39	3.1	7.25	4.9
--------------------	-----	-----	------	-----	------	------	------	------	-----	------	-----

BUPATI LAMANDAU,

ttd

MARUKAN

Lampiran IX : Peraturan Bupati Lamandau

Nomor : 08 Tahun 2009

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2009

Kabupaten : LAMANDAU

Sub Sektor : HORTIKULTURA

Jenis Pupuk : SUPERPHOS

(To

Kecamatan	Bulan											
	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1. Bulik	0	0	0	0.45	0.3	0	0	0	0	0.06	0.06	0.03
2. Bulik Timur	0	0	0	0.45	0.15	0	0	0	0	0	0	0
3. Mentohi Raya	0	0	0	0.45	0.3	0	0	0	0	0.06	0.06	0.03
4. Sematu Jaya	0	0	0	0.45	0.3	0	0	0	0	0.06	0.06	0.03
5. Belantikan Raya	0	0	0	0.15	0.15	0	0	0	0	0	0	0
6. Lamandau	0	0	0	0.45	0.15	0	0	0	0	0	0	0
7. Batang Kawa	0	0	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Delang	0	0	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabupaten Lamandau	0	0	0	2.7	1.35	0	0	0	0	0.18	0.18	0.09

BUPATI LAMANDAU,

ttd

MARUKAN

Lampiran X : Peraturan Bupati Lamandau

Nomor : 08 Tahun 2009

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2009

Kabupaten : LAMANDAU
Sub Sektor : PERKEBUNAN RAKYAT
Jenis Pupuk : SUPERPHOS

[illegible]

BUPATI LAMANDAU,

ttd

MARUKAN

Lampiran XI : Peraturan Bupati Lamandau

Nomor : 08 Tahun 2009

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2009

Kabupaten : LAMANDAU
Sub Sektor : PETERNAKAN
Jenis Pupuk : SUPERPHOS

[illegible]

7. Batang Kawa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Delang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabupaten Lamandau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

BUPATI LAMANDAU,

ttd

MARUKAN

Lampiran XII : Peraturan Bupati Lamandau

Nomor : Tahun 2009

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2009

Kabupaten : LAMANDAU

Sub Sektor : PERIKANAN BUDIDAYA

Jenis Pupuk : SUPERPHOS

Kecamatan	Bulan										
	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	No
1. Bulik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Bulik Timur	0	0	0	0	0	0.12	0.12	0	0	0	
3. Menthobi Raya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Sematu Jaya	0	0	0	0	0	0.12	0.12	0	0	0	
5. Belantikan Raya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Lamandau	0	0	0	0	0	0.12	0.12	0	0	0	
7. Batang Kawa	0	0	0	0	0	0.12	0.12	0	0	0	
8. Delang	0	0	0	0	0	0.12	0.12	0	0	0	
Kabupaten Lamandau	0	0	0	0	0	0.6	0.6	0	0	0	

BUPATI LAMANDAU,

ttd

MARUKAN

Lampiran XIII : Peraturan Bupati Lamandau

Nomor : 08 Tahun 2009

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2009

Kabupaten : LAMANDAU
Sub Sektor : TANAMAN PANGAN
Jenis Pupuk : NPK

Kecamatan	Bulan										
	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop
1. Bulik	0.2	0	0.25	0.25	0.25	0	0	0	0.25	1.25	0
2. Bulik Timur	0.2	0	0.15	0.15	0.25	0	0	0	0.15	0.5	0
3. Menthobi Raya	0.3	0.2	0.5	0.5	0.75	0.2	0.1	0.1	0.7	1.05	0.7
4. Sematu Jaya	0.3	0.2	0.5	0.75	1	0.2	0.1	0.1	0.75	1.5	0.7
5. Belantikan Raya	0.05	0.05	0.05	0.1	0.05	0	0	0	0.15	0.5	0
6. Lamandau	0.05	0.05	0.05	0.1	0.05	0	0	0	0.15	0.5	0
7. Batang Kawa	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0.1	0.15	0.1
8. Delang	0	0	0	0.1	0.1	0	0	0	0.1	0.3	0.2
Kabupaten Lamandau	1.1	0.5	1.5	2.05	2.45	0.4	0.2	0.2	2.35	5.75	3

BUPATI LAMANDAU,

tttd

MARUKAN

Lampiran XIV : Peraturan Bupati Lamandau

Nomor : 08 Tahun 2009

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2009

Kabupaten : LAMANDAU
Sub Sektor : HORTIKULTURA
Jenis Pupuk : NPK

Kecamatan	Bulan										
	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop
1. Bulik	0	0	0	1.8	1.2	0	0	0	0	0.24	0.24
2. Bulik Timur	0	0	0	1.8	0.6	0	0	0	0	0	0

3.	Menthobi Raya	0	0	0	1.8	1.2	0	0	0	0	0.24	0.24
4.	Sematu Jaya	0	0	0	1.8	1.2	0	0	0	0	0.24	0.24
5.	Belantikan Raya	0	0	0	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0
6.	Lamandau	0	0	0	1.8	0.6	0	0	0	0	0	0
7.	Batang Kawa	0	0	0	0.6	0	0	0	0	0	0	0
8.	Delang	0	0	0	0.6	0	0	0	0	0	0	0
Kabupaten Lamandau		0	0	0	10.8	5.4	0	0	0	0	0.72	0.72

BUPATI LAMANDAU,

ttd

MARUKAN

Lampiran XV : Peraturan Bupati Lamandau

Nomor : 08 Tahun 2009

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2009

Kabupaten : LAMANDAU
Sub Sektor : PERKEBUNAN RAKYAT
Jenis Pupuk : NPK

Kecamatan	Bulan										
	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop
1. Bulik	1	0.5	0	0	1	0.5	0	0.5	0.5	0	0.5
2. Bulik Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Mentobi Raya	0	1	1	0	1	1	1	1.5	1.5	0.5	1
4. Sematu Jaya	1	1.5	0	1	0	1.5	0	1	1	0.5	1.5
5. Belantikan Raya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Lamandau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Batang Kawa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Delang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabupaten Lamandau	2	3	1	1	2	3	1	3	3	1	3

BUPATI LAMANDAU,

ttd

MARUKAN

Lampiran XVI : Peraturan Bupati Lamandau

Nomor : 08 Tahun 2009

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2009

Kabupaten : LAMANDAU
Sub Sektor : TANAMAN PANGAN
Jenis Pupuk : ORGANIK

Kecamatan	Bulan											
	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1. Bulik	0.25	0.15	0.5	0.75	0.75	0.45	0.1	0.1	1.5	2	1.3	0
2. Bulik Timur	0.25	0.25	0.25	0.75	0.75	0.25	0.1	0.1	0.25	0.75	0.75	0
3. Menthobi Raya	0.55	0.25	0.75	1.25	1.75	0.25	0.2	0.1	1.75	3.75	1.75	0
4. Sematu Jaya	0.75	0.5	0.75	1.75	2.25	0.5	0.2	0.1	2.25	4.25	2.5	
5. Belantikan Raya	0.15	0.1	0.1	0.5	0.5	0	0	0	0.5	1	1	0
6. Lamandau	0.15	0.1	0.1	0.5	0.5	0	0	0	0.5	0.75	0.75	0
7. Batang Kawa	0	0	0	0	0.25	0	0	0	0	0.25	0	
8. Delang	0	0	0	0.25	0.25	0	0	0	0.25	0.25	0	
Kabupaten Lamandau	2.1	1.35	2.45	5.75	7	1.45	0.6	0.4	7	13	8.05	0

BUPATI LAMANDAU,

tttd

MARUKAN

Lampiran XVI : Peraturan Bupati Lamandau

Nomor : 08 Tahun 2009

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2009

Kabupaten : LAMANDAU
Sub Sektor : HORTIKULTURA
Jenis Pupuk : ORGANIK

Kecamatan	Bulan
-----------	-------

	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1. Bulik	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	
2. Bulik Timur	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	
3. Menthobi Raya	0	0	0	1	0.75	0	0	0	0.50	0.75	0.50	
4. Sematu Jaya	0	0	0	1	0.75	0	0	0	0.50	0.75	0.50	
5. Belantikan Raya	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	
6. Lamandau	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	
7. Batang Kawa	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	
8. Delang	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	
Kabupaten Lamandau	0	0	0	2	2	0	0	0	1	2	1	

BUPATI LAMANDAU,

ttd

MARUKAN

Lampiran XVII : Peraturan Bupati Lamandau

Nomor : 08 Tahun 2009

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2009

Kabupaten : LAMANDAU
Sub Sektor : TANAMAN PANGAN
Jenis Pupuk : ZA

Kecamatan	Bulan											
	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1. Bulik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Bulik Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Menthobi Raya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.75	0.25	
4. Sematu Jaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.25	0.25	
5. Belantikan Raya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Lamandau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Batang Kawa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Delang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kabupaten Lamandau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.5	

BUPATI LAMANDAU,

ttd

MARUKAN

Lampiran XVIII : Peraturan Bupati Lamandau

Nomor : 08 Tahun 2009

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2009

Kabupaten : LAMANDAU
Sub Sektor : HORTIKULTURA
Jenis Pupuk : ZA

Kecamatan	Bulan										
	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop
1. Bulik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Bulik Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Menthobi Raya	0	0	0	0.25	0	0	0	0	0	0.25	0
4. Sematu Jaya	0	0	0	0.25	0	0	0	0	0	0.25	0
5. Belantikan Raya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Lamandau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Batang Kawa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Delang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUPATI LAMANDAU,

ttd

MARUKAN

Lampiran XIX : Peraturan Bupati Lamandau

Nomor : 08 Tahun 2009

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2009

Kabupaten : LAMANDAU
Sub Sektor : PERKEBUNAN RAKYAT

Jenis Pupuk : ZA

Kecamatan		Bulan											
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	D
1.	Bulik	0	0	0.25	0	0	0.25	0	0	0	0.25	0	
2.	Bulik Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Menthobi Raya	0.25	0.25	0	0	0	0.25	0	0	0	0	0	
4.	Sematu Jaya	0.25	0.25	0	0.25	0	0	0	0.25	0	0.25	0	
5.	Belantikan Raya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Lamandau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Batang Kawa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Delang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kabupaten Lamandau		0.5	0.5	0.25	0.25	0	0.5	0	0.25	0	0.5	0	

BUPATI LAMANDAU,

ttd

MARUKAN